

PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI)

Dewi Anggraini
Syahrir Hakim Nasution

ABSTRACT

The objective of this research is to know The role of the People's Business Credit (KUR) for development of UMKM in Medan (Case Study of Bank BRI). The role is measured from income earned UMKM entrepreneurs after getting help from People's Business Credit (KUR) of Bank BRI and what is the most dominant factor that encourage UMKM entrepreneurs took the People's Business Credit (KUR) at Bank BRI.

The results showed that a significant KUR capital for revenue growth of UMKM in Medan. This can be seen by the results of the analysis of the estimation model, it can be seen that: $t^ > t\text{-table}$ ($4111 > 1.669013$). Thus H_0 is accepted, it means capital KUR significant or significant impact on earnings UMKM entrepreneurs at 95% confidence level. And the most dominant factor that encourage the UMKM entrepreneurs to take or use the People's Business Credit (KUR) in BRI loan interest rates lower by 37.31% followed by 29.85% recommended by a friend, easy administration of 17.91%, a longer repayment period by 7.46% and good service at 7.46%.*

Keywords : People's Business Credit (KUR), Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM)

I. Pendahuluan

Krisis yang menimpa Indonesia tahun 1997 diawali dengan krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yakni resesi ekonomi. Hal ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.

Usaha mikro, kecil dan menengah telah menjadi isu yang menarik untuk dicermati dan disikapi. Menurut Wahyuni, dkk (2005:91) hal ini dikarenakan ada beberapa alasan antara lain :

1. Saat krisis sektor UMKM dapat bertahan sampai saat ini.
2. Perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM masih kurang.
3. Sektor UMKM yang jumlahnya cukup banyak sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja.
4. Sektor UMKM memiliki peran penting dan kontribusinya cukup besar dalam struktur perekonomian nasional.

Pada saat ini pengembangan UMKM masih dilanda berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, UMKM masih diharapkan mampu menjadi andalan perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat berperan sebagai salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di Indonesia UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki

keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.

Sektor UMKM lebih sering memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Oleh karena itu sektor UMKM sering disebut kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan dimana umumnya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku UMKM adalah berupa kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Jika ditinjau dari proporsi unit usaha pada sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan; (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengangkutan dan Komunikasi; (5) Jasa-jasa (www.depkop.go.id).

Pada dasarnya hambatan dan rintangan yang dihadapi para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek yang mana salah satu dengan yang lainnya saling berkaitan antara lain; kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan keterampilan beroperasi serta tidak adanya bentuk formil dari perusahaan, lemahnya organisasi dan terbatasnya pemasaran. Disamping hal-hal terdapat juga persaingan yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi terbatas.

Dari masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM tersebut, maka pada tanggal 5 November tahun 2007 oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti banyak berperan mengembangkan UMKM dan ikut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jenis usaha yang dibiayai KUR meliputi perdagangan, pertanian, komunikasi, restoran, dan lain-lain.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan lalu lintas perekonomian yang begitu banyak jelas memiliki potensi yang besar bagi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pemerintah kota Medan telah memasukkan UMKM sebagai salah satu prioritas dalam program kerja pembangunan Ekonominya. Capaian kinerja pembinaan usaha mikro di kota Medan pada tahun 2010 yang lalu mencapai 95,10% dengan jumlah usaha mikro kecil menengah sebanyak 222.000 usaha.

Kota Medan memiliki pertumbuhan perdagangan dan industri yang cukup tinggi di Sumatera Utara, terbukti dengan perkembangan baik di sektor jasa, perdagangan dan industri setiap tahunnya. Pemerintah kota Medan telah memasukkan UMKM sebagai salah satu prioritas dalam program kerja pembangunan Ekonominya. Namun dalam kenyataannya perkembangan UMKM saat ini masih banyak menemui berbagai hambatan. Salah satu hambatan yang paling umum adalah masalah permodalan usaha mikro kecil dan menengah.

II. Tinjauan Teoritis

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut Teguh Pudjo Muljono (1990:9) kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan janji pembayaran akan dilakukan/ ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

2.1.2 Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung tersebut dalam pemberian kredit adalah (Abdulkadir dan Rilda, 2000: 59) :

1. Kepercayaan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap permohonan kredit yang akan diberikan itu dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

2. Agunan

Setiap kredit yang akan diberikan selalu disertai barang yang berfungsi sebagai jaminan bahwa kredit yang akan diterima oleh calon debitur pasti akan dilunasi dan ini meningkatkan kepercayaan pihak bank.

3. Jangka Waktu

Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak, setelah jangka waktu berakhir kredit dilunasi.

4. Risiko

Jangka waktu pengembalian kredit mengandung risiko terhalang, atau terlambat, atau macetnya pelunasan kredit, baik di sengaja atau tidak sengaja, risiko ini menjadi beban bank.

5. Bunga Bank

Setiap pemberian kredit selalu disertai imbalan jasa berupa bunga yang wajib dibayar oleh calon debitur, dan ini merupakan keuntungan yang diterima oleh bank.

1. Kesepakatan

Semua persyaratan pemberian kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

2.1.3 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Menurut Abdulkadir dan Rilda (2000: 61) Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah, bank perlu melakukan analisis kredit terlebih dahulu. Analisis kredit meliputi:

- a. Latar belakang nasabah/ perusahaan nasabah;
- b. Prospek usaha yang akan dibiayai;
- c. Jaminan yang diberikan
- d. Hal-hal lain yang ditentukan oleh bank.

Atas dasar hasil analisis kredit, bank memberikan pertimbangan dengan hati-hati apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit konsep 5C (Dahlan Siamat, 1995) :

- a. *Character* (Watak)
- b. *Capacity* (Kemampuan)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Collateral* (Jaminan)
- e. *Condition* (Keadaan)

Selain penilaian berdasarkan konsep 5C , terdapat juga penilaian kredit terhadap beberapa aspek yang menyangkut kegiatan usaha calon debitur yaitu :

- a. Aspek Pemasaran
- b. Aspek Teknis
- c. Aspek Manajemen
- d. Aspek Yuridis
- e. Aspek Sosial Ekonomi

2.2 Kredit Usaha Rakyat

2.2.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR

adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (www.smeccda.com).

2.2.2 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia) :

- a. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan ketentuan :
 1. Merupakan debitur baru yang belum pernah mendapat kredit/ pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada saat Permohonan Kredit/Pembiayaan diajukan dan/ atau belum pernah memperoleh fasilitas Kredit Program dari Pemerintah
 2. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama (MoU) Penjaminan KUR dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober 2007 s.d. 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya
 3. KUR yang diperjanjikan antara Bank Pelaksana dengan UMKM-K yang bersangkutan.
- b. KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:
 1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun
 2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12-13% efektif pertahun.
- c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

2.2.3 Tingkat Bunga Kredit Usaha Rakyat

Pada saat ini suku bunga kredit untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengalami penurunan. Suku bunga KUR skala mikro yang tadinya sebesar 22 % menjadi 20-21% efektif per tahun atau setara dengan 10-10,5% flat per tahun. Untuk tingkat bunga KUR ritel dari 14 % menjadi 12-13% efektif per tahun atau setara dengan 6-6,5% per tahun (www.vibiznewz.com). Kredit Usaha Rakyat adalah kredit program yang disalurkan menggunakan pola penjaminan dan kredit ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil yang tidak memiliki agunan tetapi memiliki usaha yang layak dibiayai bank. Pemerintah mensubsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Indonesia.

2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.3.1 Beberapa Defenisi dan Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp 50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
 - b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
 - c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
 - d. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
 - e. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir
 - f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
 - g. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
2. Usaha kecil

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas Rp. 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain :

- a. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya,
- b. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha,
- c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP,

- d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/ pendampingan,
 - e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang.
3. Usaha Menengah

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu :

- a. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
- b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
- c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
- d. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
- e. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan;
- f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

2.3.2 Beberapa Masalah yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Hubeis (2009: 4-6) permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu :

- a. Kesulitan pemasaran
Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UMK. Dari hasil studi yang dilakukan oleh James dan Akrasanee (1988) di sejumlah negara ASEAN, menyimpulkan UMKM tidak melakukan perbaikan yang cukup di semua aspek yang terkait dengan pemasaran seperti peningkatan kualitas produk dan kegiatan promosi, sulit sekali bagi UMK untuk dapat turut berpartisipasi dalam era perdagangan bebas.
- b. Keterbatasan Finansial
Terdapat dua masalah utama dalam kegiatan UMK di Indonesia, yakni dalam aspek finansial (mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Walaupun pada umumnya modal awal bersumber dari modal (tabungan) sendiri atau sumber-sumber informal, namun sumber-sumber permodalan ini sering tidak memadai dalam bentuk kegiatan produksi maupun investasi. Walaupun begitu banyak skim-skim kredit dari perbankan dan bantuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber pendanaan dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan UMK.
- c. Keterbatasan SDM
Salah satu kendala serius bagi banyak UMK di Indonesia adalah keterbatasan SDM terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi data *processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk,

meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar barang.

d. Masalah Bahan Baku

Keterbatasan bahan baku serta kesulitan dalam memperolehnya dapat menjadi salah satu kendala yang serius bagi banyak UMK di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan harga yang relatif mahal. Banyak pengusaha yang terpaksa berhenti dari usaha dan berpindah profesi ke kegiatan ekonomi lainnya akibat masalah keterbatasan bahan baku.

e. Keterbatasan Teknologi

UMKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi yang tradisional, seperti mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang bersifat manual. Hal ini membuat produksi menjadi rendah, efisiensi menjadi kurang maksimal, dan kualitas produk relatif rendah.

f. Kemampuan Manajemen

Kekurangmampuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap pengembangan usahanya, membuat pengelolaan usaha menjadi terbatas.

g. Kemitraan

Kemitraan mengacu pada pengertian berkerja sama antara pengusaha dengan tingkatan yang berbeda yaitu antara pengusaha kecil dan pengusaha besar. Istilah kemitraan sendiri mengandung arti walaupun tingkatannya berbeda, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang setara (sebagai mitra kerja).

2.4 Penelitian Terdahulu

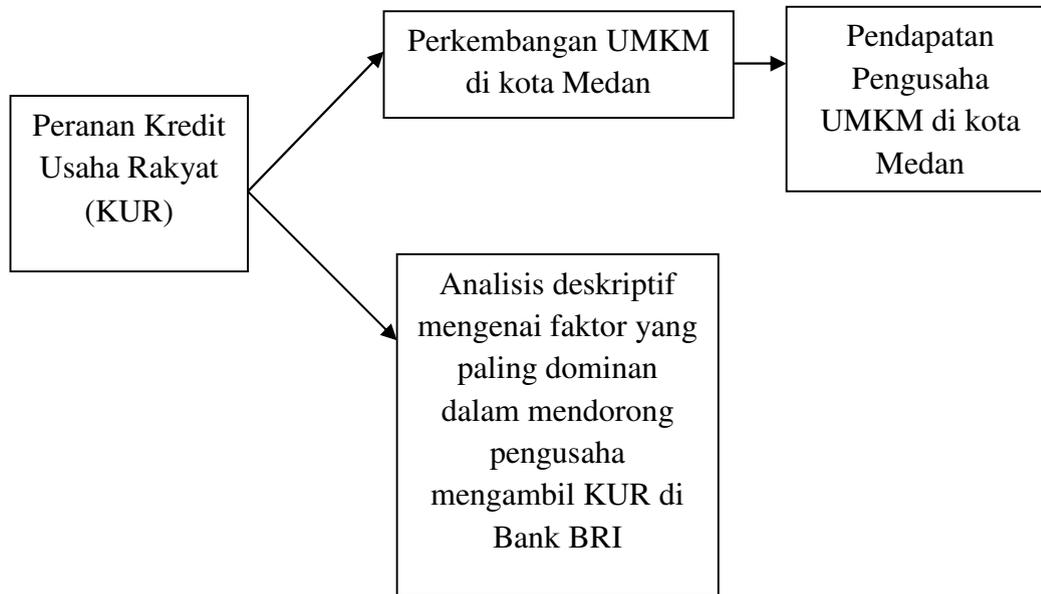
Penelitian Andriani (2008) mengenai “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit mikro, kecil, dan menengah di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang penyaluran kredit mikro, kecil dan menengah dipengaruhi secara signifikan oleh *Gross Domestic Product* (GDP), suku bunga kredit, kapasitas kredit dan *Loan Performing Loans* (NPL), dimana GDP berpengaruh positif sedangkan suku bunga kredit, kapasitas kredit dan NPL berpengaruh negatif.

Penelitian Fitria Sari (2011) “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM Agribisnis di Bogor (Studi Kasus Kospin Jasa Bogor)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang diterima UMKM sebelum dan sesudah menerima kredit, pendapatan total meningkat yaitu sebesar Rp 712.102.500 sebelum kredit dan menjadi Rp 1.803.206.000 setelah kredit.

Penelitian Adrey Julianus Pinem (2011) “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil, hal ini dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyarakat.

2.5 Kerangka Konseptual

Secara sederhana kerangka konseptual di dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1. berikut ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan pengumpulan data melalui analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dan variabel terikat dan analisis deskriptif.

3.2 Analisis Deskriptif

Analisis ini memberikan gambaran tentang karakteristik tertentu dari data yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan dianalisis sehingga menghasilkan gambaran mengenai apa saja yang menjadi faktor-faktor apa yang paling dominan dalam mendorong pengusaha UMKM di kota Medan dalam mengambil kredit usaha rakyat (KUR) di Bank BRI.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mengetahui pengaruh/hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software SPSS 19.00 for Windows*.

Kemudian bentuk fungsi tersebut dispesifikasikan ke dalam model ekonometrika dengan persamaan linear berganda. Model yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 +$$

Dimana:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Y | = | Pendapatan Usaha mikro kecil Menengah |
| α | = | Intercept / konstanta |
| X ₁ | = | Modal Sendiri (Modal Awal) |
| X ₂ | = | Modal setelah pemberian Kredit Usaha Rakyat |
| β_1, β_2 | = | Koefisien Regresi |
| | = | Term of Error |

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Deskriptif Karakteristik Sampel

Berdasarkan analisis terhadap 67 orang responden, dimana responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah pengusaha UMKM di kota Medan yang menggunakan Kredit Usaha rakyat (KUR) dari bank BRI. Deskriptif karakteristik sampel berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah laki-laki 37 orang (55,22%) dibandingkan perempuan 30 orang (44,78%).

Deskriptif karakteristik sampel berdasarkan Usia responden yang diambil dibagi atas enam kategori, dimana persentase terbanyak adalah kisaran 26-35 tahun sebanyak 29 orang (43.28%). Selanjutnya diikuti oleh umur 36-45 tahun sebanyak 27 orang (40.30%). Untuk umur 17-25 tahun sebanyak 4 orang (5.97%). Untuk umur 46-55 tahun sebanyak 4 orang (5.97%). Untuk umur 56-65 tahun sebanyak 2 orang (2.99%). Sedangkan persentase terkecil berada pada kisaran >65 tahun sebanyak 1 orang (1.49%). Gambaran keadaan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha UMKM termasuk dalam umur produktif.

Deskriptif karakteristik sampel berdasarkan tingkat pendidikan responden yang diambil dibagi atas lima kategori, dimana persentase terbanyak adalah SMA/Sederajat sebanyak 42 orang (62.69%). Selanjutnya SMP sebanyak 12 Orang (17.9%). Untuk Sarjana (S1) sebanyak 9 orang (13.43%). Untuk SD sebanyak 3 orang (4.49%). Sedangkan persentase terkecil berada pada Diploma (D1, D2, D3) sebanyak 1 orang (1.49%).

4.2 Deskriptif Perkembangan KUR

Deskriptif karakteristik berdasarkan jenis usaha dapat dibagi atas lima kategori, dimana usaha perdagangan sebanyak 30 orang (44.77%). Selanjutnya toko serba ada/supermarket sebanyak 13 orang (19.40%). Untuk jenis usaha jasa sebanyak 10 orang (14.93%). Untuk jenis usaha rumah makan sebanyak 8 orang (11.94%) dan untuk jenis usaha industri sebanyak 6 orang (8.96%). Gambaran keadaan tersebut menggambarkan bahwa usaha perdagangan merupakan usaha yang paling banyak dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Deskriptif karakteristik berdasarkan lama usaha dibagi atas lima kategori, dimana persentase terbanyak adalah kisaran 2-5 tahun sebanyak 23 orang (34.33%). Selanjutnya diikuti oleh kisaran 6-9 tahun sebanyak 17 orang (25.38%). Untuk kisaran lebih besar dari 13 tahun sebanyak 15 orang (22.38%). Untuk kisaran 10-13 tahun sebanyak 11 orang (16.42%). Sedangkan persentase terkecil berada pada kisaran lebih kecil dari 2 tahun sebanyak 1 orang (1.49%). Gambaran keadaan tersebut menjelaskan bahwa kisaran lama usaha 2-5 tahun membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya.

Deskriptif karakteristik berdasarkan tingkat pendapatan dibagi atas lima kategori, dimana persentase terbanyak adalah kisaran Rp 2.000.001 – Rp 4.000.000 dan Rp 4.000.001 – Rp 6.000.000 masing-masing sebanyak 20 orang (29.85%). Selanjutnya

kisaran Rp 6.000.001 – Rp 8.000.000 sebanyak 14 Orang (20.90%). Untuk kisaran lebih besar dari Rp 8.000.001 sebanyak 9 orang (13.43%). Sedangkan persentase terkecil berada pada kisaran lebih kecil dari Rp 2.000.000 sebanyak 4 orang (5.97%).

4.3 Hasil Persamaan Regresi

Hasil persamaan regresi dengan menggunakan model regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 1720936.169 + 0.786 X_1 + 0.236 X_2$$

Dengan menggunakan model regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi yang memprediksi kemampuan *variabel independent* Modal Sendiri (X_1) dan Modal KUR (X_2) mempunyai hubungan positif terhadap variabel *dependent* yaitu pendapatan pengusaha UMKM (Y).

Dari hasil regresi linear berganda tersebut, maka diperoleh bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 1720936.169 + 0.786 X_1 + 0.236 X_2$$

$$R^2 = 0.823$$

$$F_{hitung} = 148.722$$

Dimana :

- 1) Konstanta (a) sebesar 1720936.169 mempunyai arti bahwa variabel modal sendiri dan variabel modal kredit usaha rakyat (KUR) dianggap konstan maka tingkat pendapatan sebesar 1720936.139.
- 2) Koefisien regresi realisasi kredit (β_1) sebesar 0.786 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi jumlah produksi padi (β_2) sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_2 (modal kredit usaha rakyat) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.
- 4) Koefisien determinasi R^2 sebesar 0.823 hal ini menunjukkan kontribusi variabel bebas (X_1 dan X_2) sebesar 82.3% dan sisanya 17.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam variabel ini.

4.4 Pendorong Pengusaha UMKM Menggunakan KUR BRI

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI yaitu karena disarankan teman/keluarga adalah sebanyak 20 orang (29.85%), suku bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang (37.31%), administrasinya mudah 12 orang (17.91%), jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang (7.46%) dan pelayanan yang baik 5 orang (7.46%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI adalah suku bunga kredit lebih rendah.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Melalui hasil pembahasan terhadap peran kredit usaha rakyat bagi pengembangan UMKM di kota Medan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) sebesar 1720936.169 mempunyai arti bahwa variabel modal sendiri dan variabel modal kredit usaha rakyat (KUR) dianggap konstan terhadap pendapatan UMKM di kota Medan sebesar 1720936.139.
2. Koefisien regresi modal sendiri (β_1) adalah sebesar 0.786 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.
3. Koefisien regresi modal KUR (β_2) sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X_2 (modal kredit usaha rakyat) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.
4. Faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI adalah :
 - a. Disarankan teman/keluarga sebanyak 20 orang (29.85%)
 - b. Suku bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang (37.31%)
 - c. Administrasinya mudah sebanyak 12 orang (17.91%)
 - d. Jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang (7.46%)
 - e. Pelayanan yang baik sebanyak 5 orang (7.46%)

5.2 Saran

1. Untuk dapat meningkatkan program bantuan Kredit Usaha Rakyat sebaiknya pemerintah melalui bank-bank yang telah ditunjuk pemerintah tetap menjalankan program tersebut. Akan tetapi, dilakukan pendataan ulang untuk UMKM yang akan menerima ataupun yang sudah menerima Kredit Usaha Rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan manfaat dan tujuan diberikannya Kredit Usaha Rakyat.
2. Kepada para pengusaha UMKM, bahwa dalam penggunaan kredit usaha untuk tidak mencampur adukkannya dengan kebutuhan konsumsi agar pemanfaatannya lebih bijak dan lebih efisien sehingga hasil pun akan terlihat maksimal.
3. Kepada pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku bank milik pemerintah disamping menawarkan produk pinjaman modal yang sarat dengan *profit motive* agar juga melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada para pengusaha UMKM. Sehingga wujud tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dapat terlaksana.

Daftar Pustaka

- Andriani, S, 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Penyaluran Kredit Mikro, Kecil Dan Menengah (MKM) Di Indonesia. *Skripsi Pada Departemen Ilmu Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati, 2000. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pinem, J, 2011. Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil. *Skripsi pada Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara.
- Pudjo Muljono, Teguh, 2001. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*, Cetakan Ke-3, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sari, F, 2011. Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Perkembangan UMKM Agribisnis Di Bogor. *Skripsi pada Departemen Agribisnis*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Siamat, Dahlan, 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Intermedia, Jakarta.
- Wahyuni, Eti, dkk, 2005. *Lilitan Masalah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*, BITRA Indonesia, Medan.
- <http://www.galeriukm.web.id/news/kriteria-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm> (10 Juni 2012)
- <http://komite-kur.com/cetak-51-sebaran-kur-november-2007-sd-desember-2011.asp> (14 Juni 2012)
- <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/DDE3BFBD-3879/Suplemen4.pdf> (14 Juni 2012)
- <http://www.smecca.com/sme/kur/default.htm> (10 juni 2012)
- http://www.vibiznews.com/news/banking_insurance/2012/01/10/suku-bunga-kur-turun-2-tahun-2012/ (14 Juni 2012)